

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PATI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

Sumber daya Diskominfo Kabupaten Pati yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

1) Permasalahan Diskominfo dalam penyelenggaraan pelayanan

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama satu tahun berjalan, tantangan dan peluang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo yaitu:

- a. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang kominfo, statistik, dan persandian;
- b. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai
- c. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional;
- d. Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial;
- e. Pelaksanaan sosialisasi hasil pembangunan melalui FK Metra belum optimal;
- f. Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;

- g. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat; Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik;
- h. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;
- i. Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi;
- j. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
- k. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal;
- l. Pembangunan aplikasi dengan *platform* dan struktur berbeda;
- m. Pengelolaan pusat *application protocol interface* belum optimal;
- n. Belum ada *masterplan* pengembangan TIK ;
- o. Belum adanya *Data centre* ;
- p. Pengelolaan jaringan *internet* dan *intranet* belum optimal;
- q. Integrasi Sistem Informasi belum tercapai;
- r. Kurangnya pedoman teknis terkait *E-Government*;
- s. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.

2) Permasalahan dari Hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Diantara permasalahan – permasalahan tersebut diatas hasil analisis dalam gambaran pelayanan dapat kami tarik kesimpulan masalah pokok yang dihadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam tabel

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam Pelaksanaan E – Gov	Tuntutan percepatan Informasi dalam Pelayanan publik	Kurangnya SDM dalam bidang IT Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Infokom

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati , yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017 - 2022. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pati 2017 - 2022.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017 - 2022, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pati 2017 - 2022, adalah :

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
dan Pelayanan Publik”

(Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik)

Penjabaran makna dari visi tersebut akan diwujudkan dalam bentuk misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih:

- 1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan local;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan;

- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- 4) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan public;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- 6) Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industry;
- 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- 8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pati, maka harus kita sinkronisasikan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari uraian tersebut dapat kami jabarkan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan **Program Kerja Prioritas** terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pati adalah : **Program pengembangkan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.**

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik, penyelenggaraan E-government, statistik sektoral, persandian, dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi, memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan selama lima tahun kedepan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi 2017-2022

No	Fungsi DISKOMINFO	Misi Kabupaten Pati 2017- 2022	Program Prioritas 2017-2022
1	Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yg akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa
2	Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik		
3	Pelaksanaan administrasi		

4	urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik		
	Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika , bidang persandian serta bidang statistik		

- a. Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain :
Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi bidang/seksi/subbagian;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung kinerja. Sedangkan Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain :

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama ; Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral ;
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator pemanfaatan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Pati.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Renstra DISKOMINFO Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden.

Program Prioritas Nasional dalam RPJMN meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik untuk terciptanya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Penelaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan program Gubernur dan wakil Gubernur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode

kepemimpinannya , yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018.

Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melin-tasi batas.

Berangkat dari hal tersebut diatas dibutuhkan suatu rumusan rencana pembangunan yg sinergi dan harmonis antara pemerintah pusat melalui Renstranas , Pemerintah Provinsi Renstrada Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui Renstrada Kabupaten yang kemudian dijabarkan ke dalam Renstra tiap-tiap OPD selaku institusi pelaksana teknis diwilayah kabupaten .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati adalah bagian dari OPD di pemerintah Kabupaten Pati dalam merumuskan arah kebijakan teknis pembangunan daerah mengacu pada prosedur teknis Kementerian Kominfo dan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian Kominfo dan Provinsi antara lain :

- a. Mewujudkan tatakelola Komunikasi dan Informatika yang sehat, efisien dan aman;
 - b. Meningkatnya Komunikasi dan Informasi publik guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi.
- 1) Faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang berpengaruh pada sinergitas tujuan, sasaran dan program Renstra K / L

Tantangan dan potensi / peluang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati yang berpengaruh pada sinergitas tujuan , sasaran dan program Kementerian Kominfo ada beberapa faktor :

- a. Kurangnya Akses masyarakat terhadap informasi ;
- b. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan Infrastruktur TIK;
- c. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Belum optimalnya koordinasi external antara daerah dan pusat;
- e. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator pemanfaatan persandian dan pengelolaan keamanan informasi .

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 pada lampiran VI Indikasi Program RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 terdapat program utama perwujudan struktur ruang.

Setiap pembangunan suatu daerah tidak lepas dari acuan induk dokumen rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Untuk itu dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika harus memperhatikan dan meperhitungkan dokumen tata ruang wilayah. Sehingga dalam menentukan titik lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan kaidah-kaidah tata ruang wilayah yang sudah dibakukan dalam bentuk peraturan daerah tentang perihal tersebut. Selain itu pembangunan prasarana dan fasilitas komunikasi dan informasi juga memperhitungkan kajian lingkungan stategis sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya tidak berdampak buruk pada masyarakat luas akan tetapi akan menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian tersebut diataranya adalah studi kelayakan, anaslisis dampak lingkungan yang diakibatkan karena bencana alam.

Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Pati selama 2 tahun yang akan datang (2019-2020) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati.

Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka penyusunan RPJMD 2017-2022, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Pati selama lima tahun mendatang (2017 – 2022) sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pembangunan Jaringan dan Aplikasi yang Terintegrasi;
2. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;

3. Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran informasi yang berkualitas; Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
4. Belum adanya updating data statistik sektoral maupun statistik;
5. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah.